

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA  
KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2013-2017**

**Bayu Adji Dharmawan**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang  
bayuadjidharmawan81@gmail.com

**Ihyaul Ulum**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang  
Ihyaululum5@gmail.com

**Endang Dwi Wahyuni**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang  
dwiwahyuni\_endang@yahoo.co.id

**Abstract** : *The purpose of this research is to analyze the influence of indigenous revenue of the region, the General Allocation Fund and the Special Allocation fund to the regional fiscal self-reliance on the provincial financial body of South Kalimantan 2013-2017. The samples in this study were 13 districts/provinces of South Kalimantan. This type of research is associative research and sampling techniques use a total sampling. The results of this study showed that the indigenous revenue of the area, general allocation funds and special allocation funds jointly had an influence on the level of regional fiscal self-reliance. Partially, the indigenous revenue of the region negatively affects the regional fiscal independence, the General Allocation Fund positively affects the regional fiscal self-reliance, while the special Allocation fund negatively affects the regional fiscal independence.*

**Key words** : *Indigenous revenue, General allocation fund, Special allocation fund, Regional fiscal independence*

**Abstrak** : Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian fiskal daerah pada badan keuangan daerah provinsi Kalimantan Selatan 2013-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah 13 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Secara parsial, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah, sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah.

**Kata kunci**: Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Kemandirian fiskal daerah, Pendapatan asli daerah

## PENDAHULUAN

Penyerahan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah disertai dengan kewenangan pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus memiliki sumber sumber penerimaan sendiri untuk membiayai pengeluaran (Chodariyanti, 2015). Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan solusi dari problematika tersebut. Dengan demikian gagasan politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibandingkan dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Maka sudah waktunya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan dimana meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi yang sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, merupakan gambaran proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten. Latar belakang lain adanya transfer dana pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan fiskal horizontal, serta guna mencapai standar pelayanan untuk masyarakat Sesuai dengan PP No 55 tahun 2005 pasal 2, "Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus". Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Ndaparoka *et al*, 2018).

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyerahan fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin, 2006). Adanya desentralisasi fiskal dapat dijadikan pemisah yang jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan di bidang fiskal (penerimaan dan pengeluaran) dari level pemerintah yang lebih tinggi kepada level pemerintah yang lebih rendah. Di beberapa negara, pelimpahan kewenangan fiskal berasal dari pemerintah pusat kepada daerah (Astuty, 2018). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah yaitu Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah ada lah pendapatan-pendapatan yang tidak ter masuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas (Adyatma dan Oktaviani, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Suzan (2015) bahwa pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung periode 2009-2013. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

**H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.**

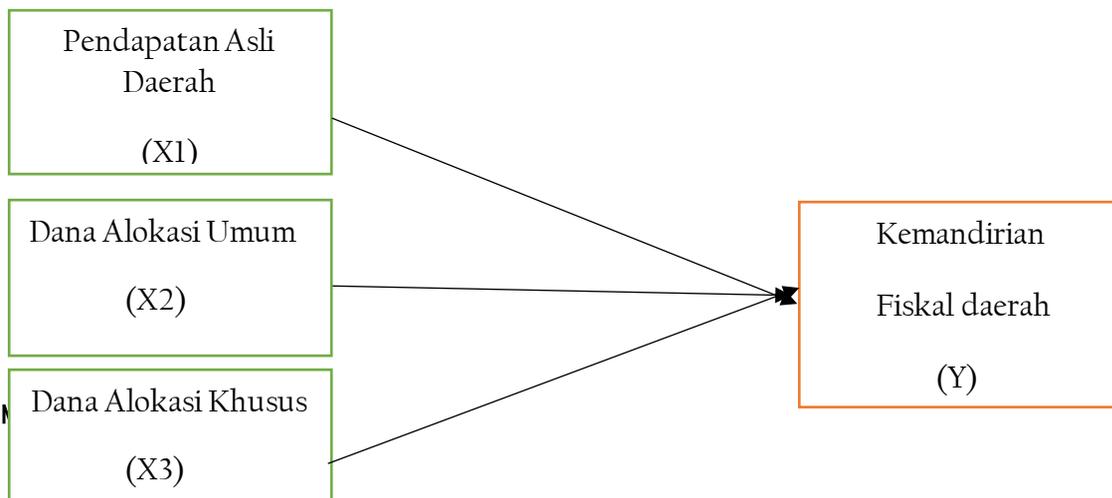
Menurut Sari (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana semakin besar DAU dari pemerintah pusat, maka tingkat kemandirian keuangan semakin rendah. Penggunaan dana transfer DAU yang efektif dan efisien untuk meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

**H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal.**

Menurut Sari (2015) bahwa bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah serta lingkungan hidup. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:

**H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal.**

**Kerangka Konseptual**



# PENGARUH PENDAPATAN ASLI . . .

## Dharmawan, Ulum & Wahyuni

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan periode 2013-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk kepentingan analisis, data PAD, DAU, DAK yang digunakan berdasarkan realisasi anggaran tahun 2013-2017, data kemandirian daerah diukur dengan rasio kemandirian, menggunakan data realisasi anggaran tahun 2014-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 25 . Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas .

##### a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji grafik dengan Normal Probability Plot dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). pada uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat probabilitas signifikan terhadap variabel. Jika probabilitas signifikan di atas 0,05, maka variabel tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2013).

##### b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2013).

##### c) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau tidak pada model regresi serta menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Penilaian uji heteroskedastisitas biasanya dengan melihat suatu pola tertentu pada grafik yang hasilnya nanti apabila pola yang dihasilkan tidak jelas maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas begitu juga sebaliknya apabila pola yang dihasilkan jelas maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

#### 2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi, mengenai nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi terhadap Variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan Variabel terikat (Kemandirian Fiskal)(Ghozali, 2013).

#### 3. Pengujian hipotesis

##### 1. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen dimana model persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Ket :

Y = Kemandirian Fiskal

A = Konstanta

B1 = Koefisien Pendapatan Asli Daerah

B2 = Koefisien Dana Alokasi Umum

B3 = Koefisien Dana Alokasi Khusus

X1= Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum

X3 = Dana Alokasi Khusus

E = Tingkat kesalahan pengganggu

##### 2. Uji R<sup>2</sup>

Koefisien determinasi R<sup>2</sup> pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel

dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013).

3. Uji f

Uji F atau pengujian secara bersama-sama ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengukuran pada uji ini memiliki batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait simpulan hasil dalam pengujian ini. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak atau terdapat pengaruh antara *good corporate governance*, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara bersama-sama. Sedangkan, apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima atau dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh antara *good corporate governance*, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara bersama-sama (Ghozali, 2013).

4. Uji t (t-test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap variabel dependen yaitu kemandirian fiskal secara parsial (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
PAD	39	3.24	16.11	8.6441	3.39073
DAU	39	29.57	55.77	43.7451	7.25424
DAK	39	.18	18.81	7.7221	5.13168
KF	39	1.17	18.38	9.6310	6.17288
Valid N	39				

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif diatas pada tabel 4.7 dapat diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 39 serta terdapat penjelasan terkait nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 3,24% yaitu Kabupaten Tapin pada tahun 2015 sedangkan data yang paling tinggi sebesar 16,11% yaitu Kota Banjarmasin pada tahun 2015. Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dengan menggunakan jangka waktu periode 2013-2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 8,64% dengan standar deviasi sebesar 3,39%. Data Dana Alokasi Umum, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 29,57% yaitu Kabupaten Balangan pada tahun 2016, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 55,77% yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013. Dana Alokasi Umum kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2013-2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 43,74% dengan standar deviasi sebesar 7,25%. Data Dana Alokasi Khusus, dapat dilihat bahwa data paling rendah sebesar 0,18% yaitu Kabupaten Balangan pada tahun 2016, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 18,81% yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2016. Dana Alokasi Khusus kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2013-2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,82% dengan standar deviasi sebesar 5,13%. Data Kemandirian Fiskal Daerah, dapat dilihat bahwa data paling rendah sebesar 1,17% yaitu Kabupaten Balangan pada tahun 2016, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 18,38% yaitu Kabupaten Tapin pada tahun 2014. Kemandirian Fiskal Daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2013-2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 9,63% dengan standar deviasi sebesar 6,17%.

2. Uji Normalitas

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI . . .**  
**Dharmawan, Ulum & Wahyuni**

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	5.01592213
	Absolute	.076
Test Statistic	Positive	.062
	Negative	-.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Hasil pengujian normalitas data dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* diatas menunjukkan nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 yang lebih tinggi dari 0,05. Sehingga dikatakan data penelitian dengan jumlah sampel 39 berdistribusi normal.

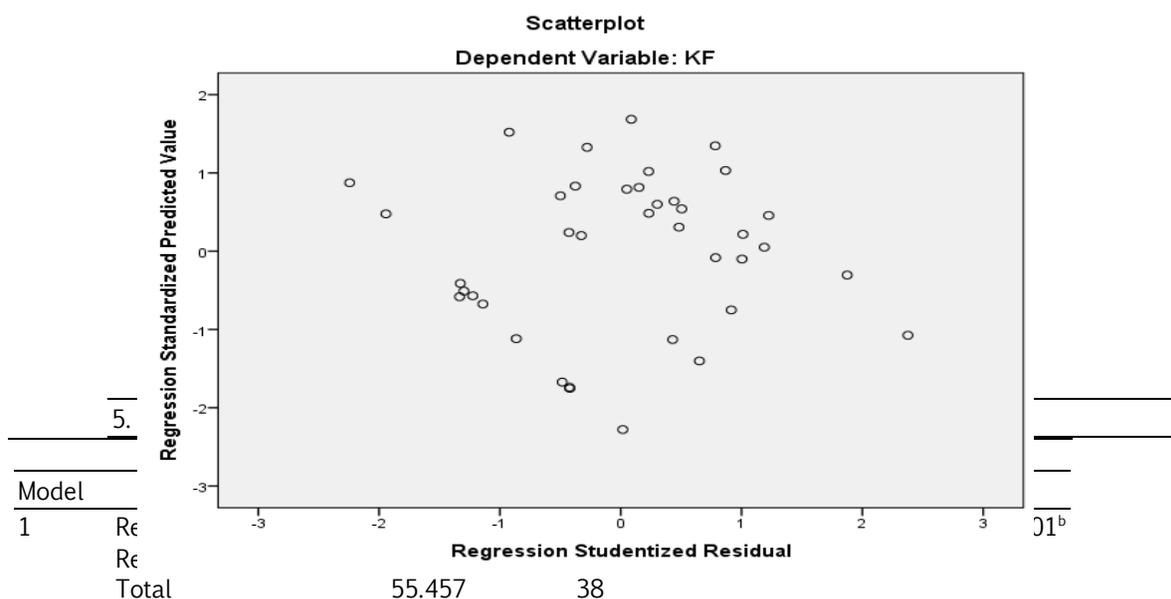
3. Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.345	6.177		2.322	.026		
	PAD	-.758	.296	-.416	-2.562	.015	.714	1.400
	DAU	.176	.118	.207	1.495	.144	.983	1.017
	DAK	-.760	.195	-.632	-3.904	.000	.720	1.389

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,10 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

4. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai F hitung sebesar 7,253 dengan nilai signifikansi 0,001. Jika dilihat dari hasil uji F ini kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variable independen secara simultan

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variable dependen atau dengan kata lain variable pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.

#### 6. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.521	2.232		1.578	.124
	PAD	-.907	.340	-.434	-2.671	.011
	DAU	.634	.288	.295	2.200	.034
	DAK	-.848	.204	-.669	-4.149	.000

#### Uji Hipotesis

Pada variabel pendapatan asli daerah dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai beta sebesar -0,907 dengan t hitung sebesar -2,671 dan nilai signifikansi sebesar 0,011. Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-2,671 < 2,030) atau  $sig\ t < 5\%$  (0,011 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variable PAD berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal. Berdasarkan data yang sudah dianalisis, hasil ini sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.

#### H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal

Pada variabel dana alokasi umum dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai beta sebesar 0,634 dengan t hitung sebesar 2,200 dan nilai signifikansi sebesar 0,034. Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (2,200 > 2,030) atau  $sig\ t < 5\%$  (0,034 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variable DAU berpengaruh terhadap kemandirian fiskal. Berdasarkan data yang sudah dianalisis, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.

#### H2 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian fiskal

Pada variabel dana alokasi khusus dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai beta sebesar -0,848 dengan t hitung sebesar -4,149 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-4,149 < 2,030) atau  $sig\ t < 5\%$  (0,000 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variable DAK berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal. Berdasarkan data yang sudah dianalisis, hasil ini sesuai dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.

#### H3 : Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal

#### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian fiskal. Dari hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.
2. Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.
3. Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian fiskal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., dan R. M. Oktaviani. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi ". *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4(2), No., hlm: 190 - 205.
- Astuty, P. 2018. "Kemandirian Keuangan Daerah: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia ". *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Kepemimpinan*, Vol. 5, No., hlm: 16.

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI . . .

Dharmawan, Ulum & Wahyuni

- Chodariyanti, L. 2015. "Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013 ". *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 14, No., hlm: 677 - 689
- Erawati, N. T., dan L. Suzan. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (studi kasus Pada DPKAD kota Bandung periode 2009-2013)". *e-Proceeding of Management*, Vol. 2, No., hlm: 3259-3266.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Giannoni, M., dan T. Hitiris. 2002. "The regional impact of health care expenditure: the case of Italy". *Applied Economics*, Vol. 34, No. 14, hlm: 1829-1836.
- Ndaparoka, D. S. R., A. T. Rantelobo, dan S. Samadara. 2018. "Model Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Kemandirian Fiskal Dan Derajat Ekonomi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat ". *JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN DAN AUDIT*, Vol. 3, No., hlm: 10-19.
- Sari, P. I. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di DIY Periode 2007-2014)". Pada *Seminar Nasional* Universitas PGRI Yogyakarta, 537-545.
- Syahrudin, H. 2006. "Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan Dan Implementasi Yang Konsisten". Vol., No., hlm.